



The Asia Foundation

# PROGRAM SETAPAK 2

(Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola)

## PENDEKATAN PROGRAM SETAPAK 2

Fokus pada isu tata kelola yang baik (good governance), terutama issue transparansi, akuntabilitas dan penegakan hukum dalam melakukan kegiatan-kegiatan advokasi masyarakat sipil.

Menitikberatkan perhatian kegiatan pada tingkat sub-national, dengan tidak mengabaikan situasi di tingkat nasional untuk memperkuat jejaring advokasi dan koordinasi implementasi kebijakan daerah dan pusat.

Menggunakan Political Economy Analysis, sebagai media untuk mengenali aktor perubahan, pesaing, peluang, hambatan dan penentuan strategi advokasi. Dengan pendekatan ini diharapkan kerja sama antar pihak (pemerintah, CSO, akademis, media dan sector swasta) dapat terjalin. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi champion yang akan didekati.

Memperkuat kerjasama dan penguatan kapasitas lembaga mitra di daerah

Memperhatikan peranan perempuan (gender mainstreaming) dalam setiap tahapan advokasi (perencanaan hingga pelaksanaan) kegiatan dan capaian hasil program SETAPAK 2.

Sejak tahun 2012, The Asia Foundation memulai program SETAPAK – Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola - yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Tata kelola yang baik menjadi dasar untuk menurunkan laju deforestasi dan degradasi lahan yang akan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memastikan manfaat dari sumber daya alam terdistribusi secara berkesinambungan dan merata. Tahap pertama program SETAPAK berakhir pada Juli 2015, dan tahap kedua dimulai dari 2015 hingga 2018. Program ini didukung oleh DFID melalui UK Climate Change Unit, Kedutaan Besar Kerajaan Inggris.

Program SETAPAK bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pembuatan kebijakan, penegakan aturan hukum, serta pengakuan hak-hak masyarakat. Selain itu, program ini juga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dalam rangka pelaksanaan program, The Asia Foundation menganut prinsip kemitraan baik dengan lembaga masyarakat sipil, instansi pemerintah dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Didasarkan pada pendekatan analisis ekonomi politik, program SETAPAK mengkombinasikan dukungan terhadap inovasi pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional dalam meningkatkan kinerjanya dalam tata kelola hutan dan lahan serta dukungan kepada masyarakat sipil dalam memantau akuntabilitas dan mendorong instansi pemerintah lebih responsif kepada publik. Strategi ini dapat membangun sinergi, mengembangkan kapasitas advokasi yang efektif serta untuk mendorong inovasi.



---

*“Persoalan tegak atau tumbangnya pohon di dalam hutan adalah persoalan politik, bukan persoalan teknis”*

---

## **RUANG LINGKUP PROGRAM SETAPAK 2**

### **A. MEMPERKUAT TRANSPARANSI MELALUI AKSES INFORMASI DAN PENGGUNAAN ANALISIS DATA DI SEKTOR HUTAN DAN LAHAN**

Salah satu aspek penting dari tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah dengan memastikan akses publik terhadap informasi terkait kebijakan dan keputusan yang menyangkut penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Terbukanya akses dokumen yang terkait inventasi pertambangan, perkebunan dan kehutanan memungkinkan masyarakat umum dan masyarakat sipil untuk memantau berbagai aspek. Program SETAPAK 2 akan memperkuat masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi publik di sektor hutan dan lahan seperti perbaikan transparansi dalam proses perizinan, kebijakan anggaran maupun pengelolaan data terkait sektor hutan dan lahan.

Dalam upaya memperkuat transparansi, program SETAPAK 2 akan fokus pada beberapa kegiatan dengan keluaran sebagai berikut :

1. Mendorong kelompok masyarakat dan masyarakat sipil untuk melakukan permohonan informasi publik ke badan publik terkait dengan data sektor hutan dan tambang.
2. Meningkatkan penggunaan data yang diperoleh melalui permohonan informasi atau skema lainnya untuk kepentingan perbaikan kebijakan dan skema advokasi lainnya.
3. Berkembangnya platform open data yang diinisiasi oleh masyarakat sipil dan kelompok lainnya agar mempermudah akses informasi dan dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk kegiatan pengawasan dan advokasi.

### **B. MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN PENEGAKAN HUKUM**

Program SETAPAK 2 akan memperkuat akuntabilitas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan, program SETAPAK 2 akan fokus pada kegiatan yang menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan wilayah kelola masyarakat (WKM) yang disetujui dan dijalankan oleh masyarakat desa, masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat.
2. Menguatnya kebijakan dan pelaksanaannya yang lebih berpihak terhadap keberlanjutan sumberdaya hutan di tingkat daerah dan pusat.

Dalam memperkuat penegakan hukum di sektor hutan dan lahan, program SETAPAK 2 akan fokus pada kegiatan yang menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Menguatnya upaya masyarakat sipil untuk memperbaiki skema penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pemberian izin pengelolaan hutan dan lahan.
2. Menguatnya upaya masyarakat sipil untuk memperbaiki skema penegakan hukum untuk mencegah aktivitas ilegal dan korupsi di sektor hutan dan lahan.

### **C. PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DAN JARINGAN**

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga jaringan merupakan tulang punggung dari upaya membangun tata kelola yang baik, mewujudkan demokrasi yang kuat dimana akuntabilitas dan keadilan dan kesetaraan tercapai. Dalam upaya memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan upaya advokasi dan pengawasan yang lebih baik dan efektif, program SETAPAK 2 akan membangun kegiatan peningkatan kapasitas yang komprehensif. Pendekatan utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sipil adalah melalui 'peer to peer learning' atau belajar diantara sesama kawan, sehingga satu sama lain dapat saling tukar informasi dan pengetahuan tentang kebijakan nasional yang mempengaruhi kebijakan provinsi, izin yang tumpang tindih, praktek ilegal dalam pengelolaan hutan dan lahan dan lain-lain. Selain itu, pelatihan formal, seminar dan lokakarya, magang belajar dan asistensi teknis akan terus dikembangkan untuk masyarakat sipil, baik yang bergerak di tingkat nasional maupun pusat.

Program SETAPAK 2 juga akan mendorong mitra untuk menggunakan beberapa pendekatan yang bersifat melengkapi kerja tata kelola secara keseluruhan dengan pengarusutamaan beberapa bidang: pertama, pengarusutamaan gender dan kelompok marginal lainnya termasuk masyarakat adat; kedua, pengarusutamaan

media dalam advokasi dan penyebaran informasi; ketiga, pendekatan ekonomi politik dalam implementasi kegiatan; keempat, memaksimalkan pendekatan mediasi konflik dalam pengelolaan hutan dan lahan; dan kelima, pendekatan pelibatan multipihak, khususnya pemerintah dan sektor swasta.

Dalam memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan jaringan, SETAPAK 2 akan fokus pada kegiatan yang menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam pengelolaan kelembagaan/organisasi.
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dan jaringan dalam pengelolaan program yang berdampak pada hasil.
3. Menguatnya jaringan masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan.

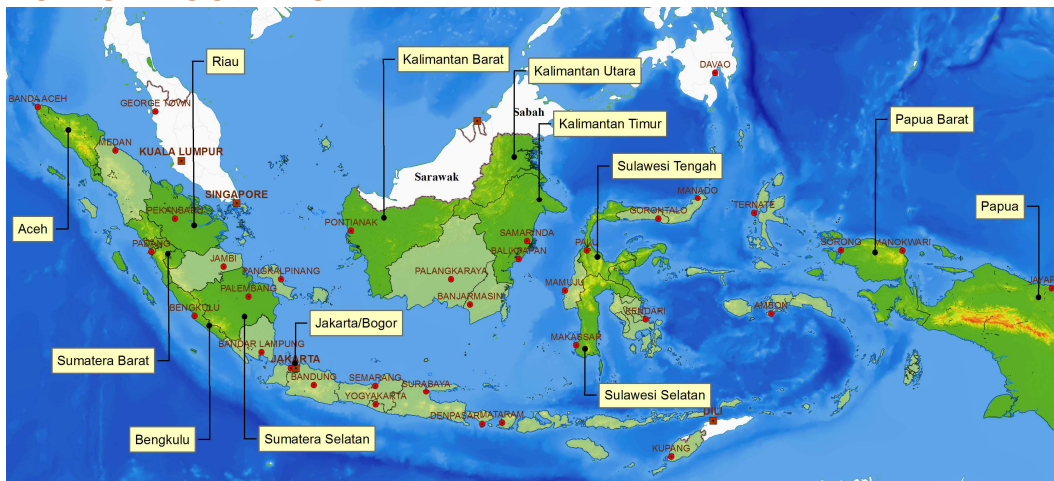
## Lembaga Mitra: 70 Organisasi

Lokasi Program	Lembaga Mitra
Nasional (14)	FWI, ICEL, ICW, PWYP, IMN, Sawit Watch, Sayogjo Institut, PPMN, IPC, IBC, HuMA, WALHI eknas, KoDE Institut, P2EB – UGM
Aceh (8)	GERAK, MaTA, JKMA, HaKA, BYTRA, JMT, LBH Banda Aceh, WALHI Aceh
Sumatera Selatan (4)	WALHI Sumsel, PINUS Sumsel, LBH Palembang, HAKI
Sumatera Barat (5)	YCM, LBH Padang, AMAN Mentawai, Qbar, WALHI Sumbar
Riau (5)	WALHI Riau, Jikalahari, LBH Pekanbaru, YMI, FITRA Riau
Kalimantan Barat (5)	SAMPAN, JARI, AMAN Kalbar, PBHK, Pancur Kasih
Kalimantan Timur (5)	AMAN Kaltim, JATAM Kaltim, Prakarsa Borneo, KBCF, Yayasan BUMI
Kalimantan Utara (3)	LP3M, PIONIR, PLH
Sulawesi Tengah (6)	JATAM Sulteng, YMP, KARSA, WALHI Sulteng, Sikola Mombine, YLBH APIK
Papua (6)	ALDP, KIPRA, LBH Papua, PtPPMA, Rumsram, Belantara Papua
Papua Barat (6)	JANGKAR, GEMAPALA, Mnuqwar, Paradisea, PERDU, PBHKP
Lokasi lain (3)	WALHI Sumut, WALHI Bengkulu, PINUS Sulse

## LOKASI PROGRAM DAN MITRA KERJA

Program SETAPAK 2 dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya hutan dan gambut yang rentan terhadap perubahan penggunaan lahan yang cepat. Dukungan program SETAPAK 2 diberikan kepada organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di 10 propinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.

### LOKASI PROGRAM SETAPAK 2



Program SETAPAK 2 juga memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemerintah di tingkat nasional. Selain itu, melalui skema *small grant*, program SETAPAK 2 memberikan dukungan kepada inisiatif-inisiatif organisasi masyarakat sipil yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah di Propinsi Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan.

## INFORMASI PROGRAM SETAPAK 2

Facebook: <https://www.facebook.com/AksiSETAPAK>

Twitter: <https://twitter.com/AksiSETAPAK>

Website: <https://programsetapak.org/>

Youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCafexfXHF6UnOLDATTo8Vbg>